

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KEPUAUAN TALAUD

Lumettu Jegiftha¹
Ronny Gosal²
Sarah Sambiran³

Abstrak

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Program pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan, namun masih ada keluhan dari masyarakat pengguna jalan dan jembatan yang merasa tidak puas dengan kinerja Dinas PUTR dalam membangun infrastruktur ini karena menduga adanya penyelewengan dana pembangunan jalan dan jembatan selama tahun 2017. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif. Dari target pembangunan jalan pada tahun 2017 yang ditetapkan sepanjang 25.014 km, ternyata yang dapat direalisasikan hanya sepanjang 17,533 km atau bila dipersentasikan sebesar + 70 %, hal ini terjadi akibat adanya defisit anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sementara untuk pembangunan jembatan dari target sepanjang 34,7 km realisasinya sepanjang 34,7 atau 100% tercapai, untuk itu disarankan agar Dinas PUTR mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemangkasan anggaran yang mengakibatkan pencapaian target pembangunan jalan tidak tercapai. Untuk menghilangkan kesan buruk tentang pembangunan jalan yang kualitasnya kurang baik, disarankan agar dinas PUTR memberikan layanan yang sama dalam membangun jalan dan jembatan di desa – desa yang jauh dari ibukota kabupaten, seperti di desa - desa yang ada di pulau Kabaruan, dan untuk meningkatkan kinerja staf dinas PUTR sebaiknya bila semua staf memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam organisasi.

Kata Kunci : Kinerja, Dinas PUTR, Pembangunan Jalan dan Jembatan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan turut menyukseskan pembangunan nasional yang diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 yang mengatur keseluruhan sistim perencanaan pembangunan baik yang bersifat jangka panjang, jangka pendek maupun tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Pembangunan infrastruktur diamanatkan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing (sub bab 4.1.2 RPJPN)serta untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan (sub bab 4.1.5 RPJPN). Amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) itu kemudian dijadikan pedoman dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dokumen jangka menengah (5 tahun), yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen jangka pendek (1 tahunan). Dalam (RPJPN) pemangunan infrastruktur fisik termasuk dalam 11 Prioritas Nasional urutan ke 5. Dengan demikian pembangunan infrastruktur sangatlah penting terutama di bidang jalan dan jembatan sebagai sarana dan prasarana infrastruktur paling mendasar yang dibutuhkan manusia guna melakukan pergerakan dari tempat satu ke tempat lainnya, di samping itu juga untuk menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi dengan daerah

penyangganya dan daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau demi mencapai tujuan NKRI) yaitu memajukan kesejahteraan umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pasal 4 menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten.

Di Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan observasi yang dilakukan ada beberapa ruas jalan yang sudah baik, tapi ada juga beberapa titik yang masih dikategorikan sebagai jalan yang rusak sedang dan sebagiannya lagi dikategorikan sebagai rusak berat. Hal ini sangat disayangkan karena dengan tidak optimalnya jalan dan jembatan dapat mengganggu kegiatan yang paling mendasar yaitu untuk sarana transportasi masyarakat. Ini juga menimbulkan spekolasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) karena kerja yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan

diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tinjauan Pustaka

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Pasolong, 2007 : 175) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Prawirosentono (dalam Pasolong, 2007:176) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Bambang Kusriyanto (2005:9) mengatakan kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu.

Surjadi (2009 :7) menjelaskan bahwa Kinerja Organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dapat dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Chaizi Nasucha (2005:129) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Mahsun (2016:25) kembali menegaskan bahwa kinerja adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Dari definisi tersebut diketahui bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas – tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program / kebijakan atau visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mahsun (2016:71) menjelaskan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa indikator dalam kinerja organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1). Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti dana,SDM dan sumber daya lain yang dimiliki.(2).Proses. Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan,ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi.(3). Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik.(4). Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah (efek langsung). Outcomes menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak. (5). Manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut akan dirasakan setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

(6). Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Selanjutnya Agus Dwiyanto (2008) mengemukakan beberapa indikator atau kriteria pengukuran kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut:

(1). Produktivitas: Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.

(2). Kualitas Layanan : Kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan public. Kepuasan masyarakat biasa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indicator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah, murah yang dapat diperoleh dari media masa dan diskusi publik.

(3). Responsivitas : Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program – program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indicator kinerja organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuan, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

(4). Responsibilitas : menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang

eksplisit maupun implisit.

(5). Akuntabilitas: menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

Menurut Inayatullah, (dalam Afifuddin, 2012:51) Pembangunan merupakan kegiatan perubahan menuju ke pola pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri. Sejalan dengan itu Dissaynake (2007) mengatakan Pembangunan adalah sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/ kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuannya sendiri.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat suatu Negara menuju situasi yang lebih baik (Deddy T. Tikson:2005). Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat , bangsa serta Negara dengan maksud mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta

seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkat yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah: (1) Meliputi seluruh aspek kehidupan, (2) Dilaksanakan secara terpadu dan (3) Meningkatkan swadaya masyarakat.

2.2.3. Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Kodoatie, R.J. (2005) mengatakan bahwa: infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan – pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan – tujuan sosial dan ekonomi. Grigg (1988) dalam Ransun (2017) menyebutkan bahwa ada enam kategori besar infrastruktur, antara lain : (1).1.

Kelompok Jalan (jalan, jalan raya, jembatan),(2). Kelompok Pelayanan Transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandara), (3). Kelompok Air (air bersih, air kotor, semua system air, termasuk jalan air),(4). Kelompok Manajemen Limbah (system manajemen limbah padat), (5). Kelompok Bangunan dan Fasilitas Olahraga Luar, (6). Kelompok Produksi dan Distribusi Energi (listrik dan gas). Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api jalan lori dan jalan kabel. Wahidi (2013:55). Jalan utama menurut statusnya dikelompokkan dalam 5 kategori jalan, yaitu : (1). Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistim jaringan jalan raya primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. (2). Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistim jaringan jalan raya primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten / kota antar ibukota kabupaten dengan jalan raya strategis provinsi lainnya. (3) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dengan sistim jaringan jalan primer yang tidak masuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan. (4). Jalan raya kota merupakan jalan umum dalam sistim jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dengan persil atau menghubungkan antar pusat pemukiman yang ada di kota. (5). Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan atau

antar pemukiman dalam desa, serta jalan lingkungan. Selain jalan, jembatan juga merupakan infrastruktur yang vital. Jembatan adalah suatu konstruksi atau bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif dan menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Fokus Penelitian adalah : (1). Kinerja Dinas PUTR pada seksi jalan dan jembatan. (2). Pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan kabupaten. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui (1). Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Jadi dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Susan Stainback dalam Sugiyono, 2014).

Hasil Penelitian

Sehubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan yang telah dibangun pada tahun 2017 secara kuantitas memang belum mencapai 100%, hal ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintah. Dalam program pembangunan jalan dan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp. 58.658.126.050 yang terealisasi adalah sebesar Rp. 55.191.317.694 atau + 94 % , sementara dari segi kualitas hal ini banyak ditentukan oleh kinerja kontraktor yang melaksanakan proyek – proyek pembangunan jalan dan jembatan.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud adalah totalitas hasil kerja yang dapat dicapainya, dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi ini dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Beberapa infrastruktur yang membutuhkan perhatian di daerah ini adalah telekomunikasi, listrik, pengairan / irigasi, bandar udara dan pembangunan jalan dan jembatan.

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan melalui hasil – hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau suatu proses. Pada kebanyakan organisasi swasta, ukuran kinerja adalah tingkat laba, namun organisasi sektor publik mengukur kinerjanya dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu yang disampaikan oleh kepala dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaud (bapak Djohari T. Gumolung, ST) dalam wawancaranya dengan peneliti yang menanyakan tentang ukuran kinerja dinas PUTR, beliau mengatakan bahwa : “Memang sangat beda ukuran kinerja swasta dengan pemerintah, kalau swasta selalu bapikir tentang keuntungan bisnis, tapi pemerintah berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat, ya walaupun memang nda samua mo jadi secepat yang torang suka, karna banyak hal yang harus dipertimbangkan”.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa fokus pengukuran kinerja dinas PUTR kabupaten kepulauan Talaud adalah pada hasil pembangunan jalan dan jembatan yang dapat memenuhi tujuan dinas PUTR .

Menjawab pertanyaan tentang kinerja para staff di dinas PUTR , kadis PUTR mengatakan “ Pada dasarnya staff dinas PUTR telah melaksanakan tugas dengan baik, namun saya juga tidak dapat menduga atau dapat mengatur pendapat masyarakat luar sana bila mereka mengatakan hal yang berbeda, karena itu hak mereka untuk mengeluarkan pendapat sesuai apa yang mereka lihat dan rasakan”. Hal ini diperkuat oleh kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara dengan para pemuka masyarakat, tokoh agama dan anggota masyarakat di pulau Kabaruan yang mengatakan bahwa sudah banyak ruas jalan yang dibangun oleh pemerintah, namun masa penggunaannya terlalu singkat karena ternyata ruas – ruas jalan yang dibangun cepat rusak. Seperti yang disampaikan oleh bapak Albert Banua yang mengatakan : “ Jalan – jalan disini kwa so banyak yang pemerintah beking, mar lantaran nyanda kras jadi ujang sadiki langsung rusak”. Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Yenny Parera yang mengatakan : “ Pemerintah so beking tu jalan mar so rusak ulang”, senada dengan itu pula yang dikatakan oleh : bapak Jemy Yura juga mengatakan: “ So bagus so tabuka tu jalan ka kampung sablah, mar cepat rusak lantaran beking asal – asal.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ada kekecewaan dan ketidakpuasan stakeholders pengguna jalan dan jembatan tersebut. Hal ini merupakan bahan evaluasi bagi dinas PUTR yang mempercayakan pembangunan jalan dan jembatan

kepada kontraktor yang dipilihnya. Kontraktor nasional dan lokal perlu mengupayakan peningkatan kinerja mutu dan daya saingnya agar dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, biaya, waktu dan sasaran seperti yang telah disepakati bersama dinas PUTR.

Salah satu kelemahan internal dinas PUTR adalah ketidak jelasan tugas pokok dan fungsi dari beberapa staf yang ada, hal ini menyebabkan ada staf yang harus bekerja rangkap dan ada yang tidak memiliki tugas yang pasti. Hal ini menyebabkan beban kerja antara staf tidak sama, dan menimbulkan kecemburuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Masyarakat melihat pembangunan jalan dan jembatan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten padahal banyak jalan dan jembatan yang ada di kabupaten kepulauan Talaud ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sejak penerapan otonomi daerah, peran investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur jalan semakin penting. Proporsi pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan pemerintah daerah terus meningkat sehingga perannya semakin dominan bahkan dalam RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum sesungguhnya jalan daerah telah dinyatakan sebagai sasaran strategis yaitu dengan meningkatkan layanan kualitas jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah, dengan outcome berupa meningkatnya kondisi mantap jalan nasional dari 87 % ke 94 % dan meningkatnya fasilitas penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 persen kondisi mantap.

Pembangunan jalan dan jembatan adalah ide dan perencanaan yang sangat besar, yang dimaksudkan untuk

memperbaiki kualitas hidup manusia secara berkelanjutan, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak untuk mewujudkan ide tersebut. Dalam program pembangunan jalan dan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp. 58.658.126.050 yang terealisasi adalah sebesar Rp. 55.191.317.694 atau +94%. Secara garis besar, potensi dan kendala dalam melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan harus dilihat pada aspek geografis, geopolitik dan geoekonomi. Dari hasil wawancara dengan kepala bidang bina marga, kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan serta stafnya dapat disimpulkan bahwa: Pulau Kabaruan dengan berbagai potensi wisata yang dimiliki seperti pantai pasir putih Mangaran, gua Arandangan di desa Damau dan air terjun Pangeran (Pannulan) seharusnya memiliki jalan-jalan yang baik untuk menunjang pariwisata daerah ini, namun hal itu belum dapat dipenuhi karena jarak tempuh yang jauh dan medan yang sulit untuk mengadakan berbagai alat dan bahan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas baik.

Kebutuhan infrastruktur di pedesaan semakin mendesak karena menjadi tulang punggung pergeseran hasil-hasil pertanian maupun manusia. Dengan semakin lancarnya arus pergerakan hasil pertanian maupun produk-produk lokal lainnya, tentu akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Dari wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat di desa Sawang diketahui bahwa hasil-hasil pertanian dan perikanan desa ini sekarang telah lebih cepat dapat dipasarkan, karena adanya pembangunan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan dibutuhkan tenaga

kerja yang handal, saat ini dinas PUTR memiliki 48 tenaga kerja (dapat dilihat pada lampiran 2) dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi target pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini merupakan kekuatan organisasi dinas PUTR dalam pelaksanaan tugas sehari – hari seperti yang dikatakan oleh kadis PUTR (Bapak Djohari Gumolung) sebagai berikut: “Dinas PUTR kabupaten kepulauan Talaud dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya karena didukung oleh personil yang mampu bekerja dengan baik, hal ini tidak lepas dari usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dari masing-masing staf yang membutuhkan peningkatan keahlian untuk menanggapi tugas-tugas yang harus segera diselesaikan, apalagi dinas PUTR ini adalah dinas yang baru terbentuk tahun 2016, jadi masih sangat banyak pembenahan internal yang harus dilakukan. Dalam hal pembagian tugas bagi staf memang sudah dilaksanakan, namun karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan maka banyak kali terjadi kerja rangkap yang mengakibatkan beban pekerjaan staf menjadi lebih banyak daripada yang seharusnya, namun kedepannya nanti akan diusahakan pembagian tugas staf yang lebih baik”.

Salah satu kelemahan pula yang terjadi di Dinas PUTR adalah adanya pemangkasan anggaran pembangunan jalan dan jembatan, hal ini merupakan ancaman dalam pelaksanaan pembangunan, seperti yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu, hal ini mengakibatkan pencapaian target pembangunan jalan tidak tercapai, dari data yang ada ternyata target pencapaian pembangunan jalan adalah 25.014 km, namun realisasi yang

dicapai hanya 17.533 km, bila dipersentasikan hanya mencapai + 70 %. Sementara target pembangunan jembatan sepanjang 34.7 km dapat direalisasi sepenuhnya atau mencapai 100% tercapai.

Kesimpulan

1. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dapat dicapai suatu organisasi yang dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya. Dari target pembangunan jalan pada tahun 2017 yang ditetapkan sepanjang 25.014 km, ternyata yang dapat direalisasikan adalah sebesar 17,533 km atau bila dipersentasikan sebesar + 70 %, hal ini menyebabkan timbulnya keraguan masyarakat akan penggunaan dana pembangunan jalan.
2. Kinerja dinas PUTR sudah baik bila dilihat dari tanggapan masyarakat di pulau Karakelang dan pulau Salibabu, namun masih ada keluhan dari masyarakat pulau Kabaruan yang desanya jauh dari ibukota kabupaten, yang mengeluhkan kualitas jalan yang mereka miliki.
3. Kinerja dinas PUTR khususnya seksi jalan dan jembatan memang sudah baik bila dilihat dari pencapaian target pembanguan jembatan telah dicapai, namun secara organisasi masih memiliki kelemahan karena adanya staf yang tidak jelas tugas dan fungsinya dalam organisasi.
4. Dalam program pembangunan jalan dan jembatan yang dianggarkan sebesar Rp. 58.658.126.050 dana yang terserap adalah sebesar Rp. 55.191.317.694 atau + 94 %

Saran

1. Adanya pemangkasan anggaran untuk pembangunan jalan, mengakibatkan target pembangunan jalan tidak tercapai. Untuk itu disarankan agar dinas PUTR mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar keraguan masyarakat tentang penggunaan dana untuk pembangunan jalan dapat dihilangkan.
2. Kinerja dinas PUTR akan lebih meningkat bila dapat memberikan layanan yang sama kepada masyarakat di desa – desa yang jauh dari ibukota kabupaten, seperti di desa-desa yang ada di pulau Kabaruan.
3. Untuk lebih meningkatkan kinerja staf dinas PUTR sebaiknya bila semua staf memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam organisasi.
4. Penyerapan anggaran pembangunan yang mencapai 94% mengindikasikan bahwa kinerja dinas PUTR dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sudah sangat baik, namun hal ini harus diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat bagi para kontraktor yang menangani proyek pembangunan jalan agar dapat melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang tepat mutu, biaya, waktu dan sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bungbin B, 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi Usman, 2011. Asas Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gie, The Liang, 2007. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.

- Gunawan Imam, 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Koesomowidjojo, R.M Suci, 2017. Balanced Scorecard Model: Pengukuran Kinerja Organisasi Dengan Empat Perspektif. Jakarta ; Raih Asa Sukses.
- Luthans, 2009. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Samarinda: Laksbang Persindo Jogjakarta.
- Nugroho – Dahuri, 2012. Pembangunan Wilayah Perspektif ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES
- Priansa – Garnida, 2013. Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional. Bandung : Alfabet.
- Rangkuti Freddy, 2016. Swot Balancep Scorecard; Teknik Menyusun Strategi Korporal yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Resiko. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Roestanto Wahidi, 2013. Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Di Indonesia. Bogor: Kekal Press.
- Saleh, Darwin 2, 2014. Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia. Depok ; Raas.
- Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta.
- Susanto, B.2012. Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Jakarta ; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Warsanto, 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta : Gramedia.
- Wibisono, D. 2011. Manajemen Kinerja Korporasi Dan Organisasi : Panduan Penyusun Indikator, Surabaya: Erlangga.
- Willar, D. 2017. “Developing Attributes For Evaluating Construction Project Based Performance”. The TQM Journal. Vol.29 Iss 2,pp.36 -38.
- Willar, D. Trigunarysyah, B. and Coffee,V. 2016. “ Organizational Cultural and Quality Management System Implementation in Indonesiaa Construction Companies, and Architectural Management. The TQM Journal. Vol. 23 Iss.pp 114 – 133.
- Willar, D. Coffee,V. and Trigunarysyah, B. 2015.”Examining The Implementation Of Iso 9001 In Indonesian Construction Companies”. The TQM Journal. Vol 27 Iss,pp 94 – 107.
- Dokumen Peraturan/Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- Skripsi dan Jurnal :
Nahar, Munandar, dan Susanti.2017. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Salatiga Dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 Vol 1, No 2, July 2017, pp 117 – 125. ISSN 2549 – 0737, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upt/download/20083/9470/> di akses tanggal 23 Februari 2018 pukul 08.02
- P, Megaria Elisabeth, Rusli, H Zaili. 2015. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Toba Samosir. Jom FISIP Vol 2 No 1 –

- Februari 2015.
<https://media.neliti.com/media/publication/31932-ID-kinerja-dinas-pekerjaan-umum-dalam-pemeliharaan-jalan-dan-jembatan-di-kabupaten.pdf> di akses tanggal 23 Februari 2018 pukul 08.12
- Ransun, Kalangie, Sendow. 2017. Kinerja Dinas PUTR Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah Vol 1, No 1 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekatif/article/view/1556/15098> di akses tanggal 23 Februari 2018 pukul 08.30
- Media Elektrik :
www.artikelilmiah.xyz/2017/12/definisi-pengertian-pembangunan-menurut.html?m= di akses tanggal 10 Februari 2018 pukul 08.00 WITA
- www.dosenpendidikan.com/21pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap di akses tanggal 10 Februari 2018 pukul 08.26
- elib.unikom.ac.id/download.php?id=189684 di akses tanggal 10 Februari 2018 pukul 09.00
- library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/2/2012-2-01190-mo%20Bab2001.pdf di akses tanggal 10 Februari 2018 pukul 09.08
- <https://brainly.co.id/tugas/1521867> di akses tanggal 10 Februari 2018 pukul 10.02